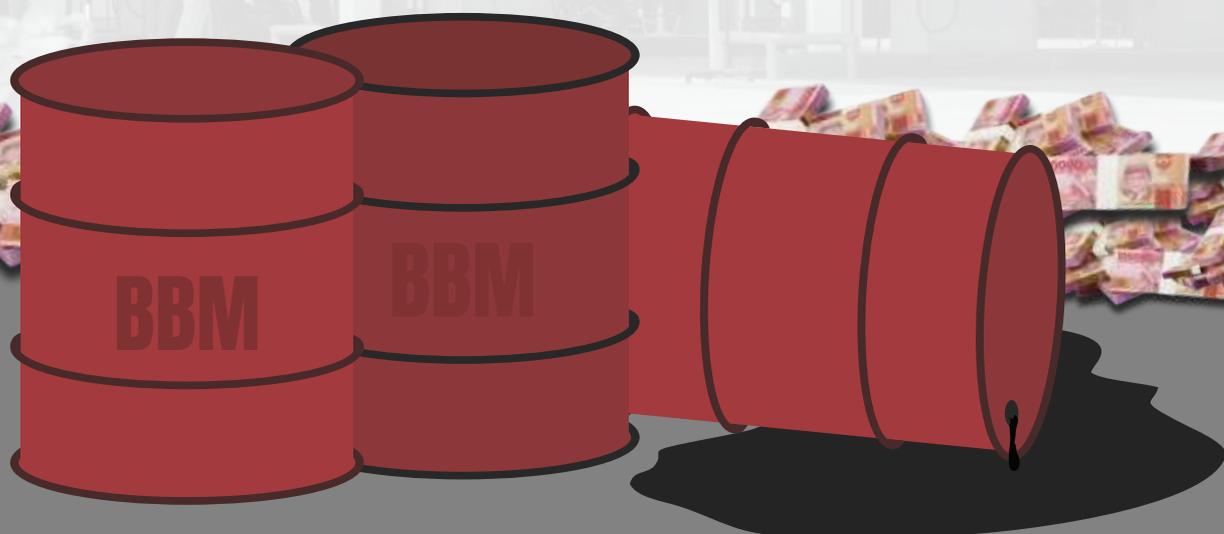


BOROK PERTAMINA: PERTALITE DIOPLOS JADI PERTAMAX

Kejagung Tetapkan 7 Tersangka, Negara Rugi Rp 193,7 Triliun



Kejaksanaan Agung (Kejagung) membongkar borok tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Penyidik kejaksanaan menemukan adanya pemufakatan jahat. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Peralite untuk kemudian 'diblending' atau dioplos menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Peralite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dugaan korupsi yang dilakukan selama periode 2018-2023 diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Kerugian ini berasal dari berbagai komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. Ada tujuh orang tersangka yang dijerat Kejagung dalam perkara ini. Empat di antaranya merupakan petinggi di subholding Pertamina, berinisial RS, SDS dan YF dan AP. Sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah MKAR (Muhammad Kerry Andrianto Riza) selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jengjala Maritim; GRJ selaku Komisaris PT Jengjala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak. Kasus inipun membuat warganet geram. Akibatnya, kata 'Pertamina' dan 'Pertamax' menjadi trending di media sosial X, sebagai wujud kekecewaan publik. Dalam nada yang serupa publik merasa ditipu. Duh.

Baca Hal 11....

PROFIL 3 SUBHOLDING PERTAMINA TERJERAT KORUPSI



PT Pertamina Patra Niaga

Subholding commercial dan trading Pertamina yang mengelola rantai bisnis hilir, termasuk penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM, LPG, pelumas, dan petrokimia. Ditunjuk sejak 13 Juni 2020.



PT Kilang Pertamina Internasional

Subholding refining dan petrochemical Pertamina yang mengelola megaprojek pengolahan dan petrokimia. Didirikan 13 November 2017, dengan anak usaha seperti PT PRPP (Tuban) dan PT KPB (Balikpapan).



PT Pertamina International Shipping

Subholding integrated marine logistic (IML) yang mengelola pelayaran, jasa kelautan, dan logistik Pertamina. Mengoperasikan lebih dari 400 kapal dan 140 pelabuhan, ditunjuk sebagai subholding IML sejak Agustus 2021.

7 TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI TATA KELOLA MINYAK MENTAH DAN PRODUK KILANG (2018-2023):

- 1. Riva Siahaan (RS) - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga**
 - Bersama SDS dan AP, mengondisikan rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan produksi kilang.
 - Mengalahkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum.
 - "Menyulap" BBM Peralite menjadi Pertamax.
- 2. DS - Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional**
 - Bersama RS dan AP, mengondisikan rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan produksi kilang.
 - Mengalahkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum.
- 3. AP - VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional**
 - Bersama RS dan SDS, mengondisikan rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan produksi kilang.
 - Mengalahkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum.
- 4. YF - Pejabat PT Pertamina International Shipping**
 - Melakukan mark up kontrak pengiriman pada impor minyak mentah dan produk kilang.
- 5. MKAN - Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa**
 - Keuntungan dari mark up kontrak pengiriman yang dilakukan YF, negara membayar fee 13-15% yang menguntungkan MKAN.
- 6. DW - Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jengjala Maritim**
 - Bersama GRJ, berkomunikasi dengan AP untuk memperoleh harga tinggi meskipun syarat belum terpenuhi.
- 7. GRJ - Komisaris PT Jengjala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak**
 - Bersama DW, berkomunikasi dengan AP untuk memperoleh harga tinggi meskipun syarat belum terpenuhi.



Tangan Kanan Putin Temui Prabowo, Media Asing Soroti Kerja Sama Pertahanan

JAKARTA-Sejumlah media asing menyoroiti kedatangan tangan kanan Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat tinggi keamanan Kremlin, Sergei Shoigu, ke Indonesia, Selasa (25/2/2025).

Salah satunya media Rusia, The Moscow Times. Dikatakan bagaimana Shoigu melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk berunding. Kedua negara dikatakan berupaya memperkuat kerja sama pertahanan.

"Pejabat tinggi keamanan Rusia, Sergei Shoigu, mengunjungi Indonesia pada hari Selasa untuk berunding dengan Presiden Prabowo Subianto dan menteri pertahanannya saat Moskow dan Jakarta berupaya memperkuat kerja sama pertahanan," tulis laman yang mengaku media independen Rusia itu.

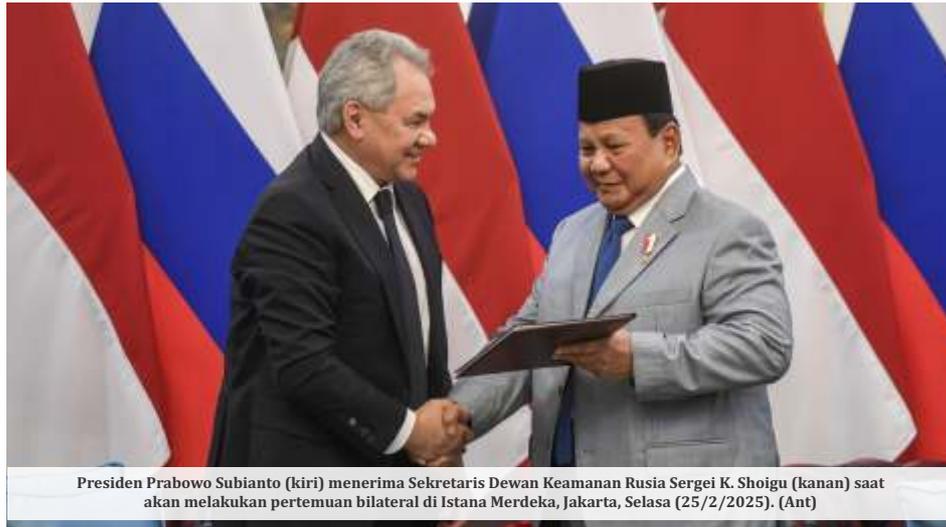
"Ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral, menolok untuk memihak dalam perang Ukraina atau persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China," tulisnya soal RI.

"Shoigu, mantan menteri pertahanan Rusia dan sekarang sekretaris Dewan Keamanannya, dianggap sebagai tokoh kunci dalam keputusan untuk mengirim pasukan Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan tetap menjadi sekutu setia Presiden Vladimir Putin," tambah laman tersebut dalam artikel berjudul "Russia's Shoigu Visits Indonesia for Defense Talks".

Mengutip media Rusia lain, RIA Novosti, diingatkan pula bagaimana Prabowo mengunjungi Moskow Juli 2024 lalu untuk berunding ke Putin. Prabowo sendiri disebut laman itu telah berjanji mengambil peran yang lebih tegas di panggung dunia.

"Pada bulan November, Indonesia dan Rusia melakukan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka. Rusia mengerahkan tiga kapal perang kelas korvet, sebuah kapal tanker berukuran sedang, sebuah helikopter militer, dan sebuah kapal tunda untuk latihan di lepas pantai pulau utama Indonesia, Jawa," muatnya.

"Jakarta telah mempertahankan hubungan dagang bernilai miliaran dolar dengan Moskow, tetapi impor senjata utama telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir setelah Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014 dan invasi besar-besarnya ke Ukraina," tulis laman itu.



Presiden Prabowo Subianto (kiri) menerima Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei K. Shoigu (kanan) saat akan melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/2/2025). (Ant)

"Meski begitu, sejak menjabat sebagai menteri pertahanan Indonesia pada tahun 2019, Prabowo tetap mempertahankan kesepakatan senilai US\$1,1 miliar untuk jet tempur Rusia yang disepakati setahun sebelumnya, meskipun ada laporan ancaman sanksi AS," lapor media tersebut lagi.

Sebelumnya media Prancis, AFP, juga menyoroiti kedatangan Shoigu ke RI. Dikutip bagaimana Prabowo menerima Shoigu di istana dan mengatakan "kunjungan tersebut adalah momen penting untuk memperkuat hubungan bilateral" kedua negara.

"Mereka membahas berbagai isu strategis terkait hubungan bilateral dan keamanan regional," tulis laman itu di artikelnya "Russia security chief meets Prabowo in Indonesia".

"Istana mengatakan kunjungan itu membuka peluang yang lebih luas untuk kerja sama di masa depan dengan kedua belah pihak berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis mereka," tambahnya.

Media AS, Associated Press (AP), juga membuat pemberitaan berjudul 'Russia and Indonesia hold talks to strengthen ties on defense and security'. Disebut bagaimana kunjungan Shoigu merupakan pemberhentian pertama dalam lawatan lima hari ke Asia yang juga mencakup Malaysia.

"Indonesia telah berupaya mempertahankan posisi netral sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022," tulis AP.

"Pendahulu Prabowo, Joko Widodo, adalah pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Moskow dan Kyiv pada Juli 2022, dengan harapan dapat mendorong gencatan senjata," tambahnya.

Surat Khusus dari Putin

Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei K. Shoigu menyampaikan surat titipan dari Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ia sampaikan langsung saat bertemu Prabowo di Istana Negara, Selasa (25/2/2025).

Sergei Shoigu menyampaikan salam hormat dari Presiden Putin kepada Presiden Prabowo serta menyerahkan surat pribadi dari pemimpin Rusia tersebut.

"Semuanya baik-baik. Presiden Putin, beliau minta kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada Yang Mulia. Lebih daripada itu saya sudah mendatangkan surat pribadi dari Presiden Putin kepada Yang Mulia," kata Sergei Shoigu, mengutip keterangan resmi.

Prabowo juga menyambut hangat kedatangan Sergei. Bahkan mengungkapkan bahwa kunjungan Sergei kurang lama di Indonesia.

"Terima kasih kedatangan Yang Mulia. Kita sahabat lama, dan saya sangat gembira Yang Mulia di sini. Tapi, kurang lama di sini," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menanyakan kabar Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Bagaimana (kabar) sahabat saya, Presiden Putin? Sehat?" tanya Prabowo.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan Sergei Shoigu juga bertukar pandangan mengenai isu-isu strategis global serta potensi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Pertemuan itu tersebut ditutup dengan jamuan santap siang di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta.

Tampak hadir mendampingi

Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari.

Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan bahwa kerja sama tersebut demi memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia.

Selain itu, kerja sama itu akan menguntungkan militer Indonesia karena TNI dapat belajar banyak dari Rusia selaku negara yang memiliki industri canggih di bidang teknologi.

TNI, lanjut Frega, juga dapat belajar banyak soal taktik dan strategi perang dengan militer Rusia selaku kekuatan militer yang saat ini berstatus aktif dalam peperangan.

Kegiatan latihan bersama antara Indonesia dan Rusia sudah pernah terjadi. Yang paling baru adalah kegiatan latihan bersama ORRUDA di kawasan Laut Jawa pada tahun 2024.

Selain itu, kerja sama di bidang teknologi juga dapat terjadi mengingat banyak alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI banyak yang dibuat Rusia.

"Ada Sukhoi 27 dan Sukhoi 30, kemudian dari Angkatan Darat ada juga Heli, Mi 35, dan Mi 17. Angkatan Laut juga di Marinir, ada kendaraan lapis baja, BMP-3F, termasuk juga senjata ringan Kalashnikov, AK-101, dan AK-102," katanya.

Terakhir adalah kerja sama bidang pertukaran prajurit. Program ini, kata dia, para prajurit yang dikirim oleh masing-masing negara.

Dengan adanya program pertukaran pelajar ini, dia berharap prajurit dapat menyerap ilmu di bidang pertahanan dari Rusia, begitu pula sebaliknya.

Melalui program pendidikan pertukaran prajurit, dia mengharapkan setiap prajurit dapat membangun koneksi dan membuka jaringan di kancah internasional.

Dengan ragam skema kerja sama ini, Brigjen TNI Frega berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia makin erat dan kekuatan militer masing-masing negara makin meningkat. (wid, rls, ist, ant/dya)

DPR Buka Peluang Diskon Listrik Dilanjutkan, Akan Bahas dengan Kementerian ESDM

JAKARTA - Subsidi listrik yang diberikan kepada masyarakat pada Januari sampai Februari 2025 mendapat respons positif dan dinilai membantu rakyat. Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka peluang agar subsidi ini dilanjutkan tapi masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyatakan akan segera membahas usulan tersebut dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Saya pikir sesuatu yang baik, silakan kita teruskan. Tetapi pada akhirnya semuanya terkait dengan anggaran dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Namun, terkait ketersediaan anggaran untuk memperpanjang subsidi ini, Bambang menyebut DPR masih akan melihat bagaimana alokasinya dalam APBN. "Soal anggarannya nanti kita lihat di APBN seperti apa," katanya.

Saat ditanya apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah, Bambang menyebut pembahasan akan dilakukan dalam waktu dekat. "Nanti kami akan bicarakan dengan pemerintah," ujarnya.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum melakukan pembahasan terkait wacana perpanjangan diskon tarif listrik.

"Jadi penyesuaiannya kan kemarin sampai dengan akhir sampai dengan akhir Februari. Kalau ada penambahan ya kan berarti ada penambahan anggaran karena konsekuensi anggaran kan belum menentukan," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, dikutip Rabu (19/2/2025).

Sebelumnya, PT PLN (Persero) memastikan diskon tarif listrik sebesar 50% masih akan berlaku hingga Februari 2025. Adapun, program tersebut sudah berjalan mulai 1 Januari 2025 hingga Februari 2025.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sempat menjelaskan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut.

"Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025," ujar Darmawan



Petugas PLN sedang melakukan penambahan daya di rumah pelanggan. Dengan besar daya yang cukup, pelanggan bisa menikmati listrik yang aman dan nyaman. (Dok. PLN (Persero))

beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.

Adapun, untuk pelanggan pascabayar potongan tarif 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah (50%) dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di mana pun.

Tambah Daya Diskon 50%

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sendiri, menghadirkan promo baru berupa tambah daya sebesar 50 persen untuk seluruh pelanggan di semua golongan tarif. Selain itu, PLN memberikan tambahan diskon 50 persen khusus untuk pelanggan rumah ibadah melalui program Menyambut Ramadan 2025.

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti mengatakan, program tersebut merupakan langkah perseroan untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, terutama dalam menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadhan 2025. "Kami berharap (program) ini dapat membantu dan mendukung kebutuhan listrik masyarakat selama Ramadhan 1446 Hijriah (H)," katanya dalam siaran pers, Selasa (25/2/2025).

Edi menjelaskan bahwa selama Ramadhan, kebutuhan listrik

masyarakat cenderung meningkat. Oleh karenanya, kata dia, PLN kembali menghadirkan program Menyambut Ramadan 2025.

"Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya yang lebih terjangkau," ucap Edi.

Adapun untuk memanfaatkan promo Menyambut Ramadan 2025, pelanggan hanya perlu melakukan satu kali transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Program ini berlaku mulai Sabtu (22/2/2025) hingga Sabtu (1/3/2025). Promo tersebut mencakup pelanggan tegangan rendah dari semua golongan tarif, baik untuk daya 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA (1 fasa), maupun 6.600 VA hingga 13.200 VA (3 fasa).

Perlu diketahui, promo Menyambut Ramadan 2025 hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 31 Januari 2025. Setelah melakukan transaksi, baik prabayar atau pascabayar, pelanggan akan otomatis menerima e-voucher tambah daya di menu "Reward" pada aplikasi PLN Mobile dan melalui e-mail terdaftar.

Sebagai simulasi, jika pelanggan tegangan rendah dengan daya 1.300 VA ingin menaikkan daya menjadi 4.400 VA, biaya normalnya adalah sebesar Rp 3.003.900. Namun, melalui program Menyambut Ramadan 2025, pelanggan hanya perlu membayar setengahnya, yaitu Rp 1.501.950. Bagi rumah ibadah, dengan daya dan kenaikan yang sama, biaya yang dikenakan hanya sebesar Rp 750.975.

Konsumsi listrik Indonesia cukup tinggi. Realisasi konsumsi listrik pada 2024 telah mencapai 1.441 kWh per kapita. Angka tersebut melonjak 7,78% dibandingkan capaian 2023 yang tercatat hanya 1.337 kWh per

PERKEMBANGAN KONSUMSI LISTRIK DARI TAHUN KE TAHUN:

- Pada tahun 2017, konsumsi listrik per kapita di Indonesia sebesar **1.021 kWh**
- Pada tahun 2018, konsumsi listrik per kapita di Indonesia sebesar **1.064 kWh**
- Pada tahun 2019, konsumsi listrik per kapita di Indonesia sebesar **1.084 kWh**
- Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita di Indonesia sebesar **1.089 kWh**
- Pada tahun 2022, konsumsi listrik per kapita di Indonesia sebesar **1.173 kWh**
- Pada tahun 2023, konsumsi listrik per kapita di Indonesia sebesar **1.337 kWh**
- Pada tahun 2024, konsumsi listrik per kapita di Indonesia sebesar **1.411 kWh**

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia pada semester I tahun 2024 mencapai 93 gigawatt (GW).

-  **49,88 GW** berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
-  **25,24 GW** berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
-  **4,64 GW** berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
-  **13,71 GW** berasal dari pembangkit EBT, seperti PLTA, PLTP, PLT-Bio, dan PLTS



kapita.

Sementara itu, hingga Desember 2024, ia mencatat kapasitas terpasang pembangkit Indonesia telah mencapai 101 gigawatt (GW). Rinciannya yakni 86 GW atau 85% berasal dari pembangkit energi fosil dan 15,1 GW atau 15% berasal dari pembangkit EBT.(wid, ant, rls/dya)

Sumber Rp 565 M Sitaan Kasus Impor Gula: Tak Ada Nama Tom Lembong

JAKARTA-Kejaksanaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 565,3 miliar dalam kasus korupsi impor gula. Sumber duit tersebut dari pengembalian para tersangka kasus yang terjadi di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 ini.

Mengejutkannya, tidak ada nama tersangka mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong dalam daftar 9 nama yang mengembalikan uangnya.

"Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung RI telah melakukan penyitaan uang sebanyak Rp 565.339.071.925,25," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Qohar menyebut uang tersebut dikembalikan sembilan tersangka secara sukarela. Uang itu, sebut dia, menjadi barang bukti dalam proses penyidikan Kejagung.

"Di mana kerugian uang negara diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka. Dan yang bersangkutan beriktikad baik untuk mengembalikan. Karena ini dalam proses penyidikan, uang



Direktur Penyidikan Jaksas Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksanaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar (kedua kiri) berbicara didampingi Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (kanan) saat konferensi pers dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan impor gula di Kemendag tahun 2015-2016, Gedung Kartika Kejaksanaan Agung RI, Jakarta, Selasa (24/2/2015). Ant

pengembalian ini oleh penyidik disita sebagai barang bukti. Ini kerugian negara tahun 2015-2016," ujarnya.

Saat ditanya ada tidaknya aliran dana dari pengembalian uang tersebut, Qohar tidak menjelaskan secara pasti. Dia mempersilakan untuk mengikuti proses kasus tersebut di pengadilan.

"Bahwa apakah ada aliran uang ke TTL, ini nanti akan kita lihat bersama di depan persidangan. Perkara ini untuk dua tersangka yang terdahulu saat ini sudah dalam tahap penuntutan dan insyaallah dalam minggu ini akan dilaporkan ke Kejaksaan, maaf,

(maksudnya) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan," ucapnya.

"Kemudian yang kedua, untuk sembilan tersangka progresnya masih dalam tahap penyidikan. Jadi masih dalam proses penyidikan," imbuhnya.

Diketahui dalam kasus ini, total telah ditetapkan sebanyak 11 tersangka oleh Kejagung. Dua tersangka selain nama-nama di atas adalah Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus..

Direktur Penyidikan Jaksas Agung

Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan kerugian yang terjadi saat itu bukan di masa Tom menjabat.

"Ini adalah kerugian di tahun 2016 yang pada saat itu pejabatnya bukan Pak Menteri Perdagangan saat itu, bukan Pak Thomas Lembong," ujar Qohar dalam konferensi pers di Jakarta.

"Maka kerugian itu tidak dibebankan kepada para tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Pak Thomas Lembong," imbuhnya.

Namun, lanjut Qohar, hal itu tak berarti Tom tidak menerima aliran dana korupsi. Ia pun mengatakan aliran yang itu akan terungkap dalam proses persidangan.

"Bahwa apakah ada aliran uang Pak TTL, ini nanti akan kita lihat bersama di depan persidangan," tuturnya.

Kejagung telah menetapkan Tom Lembong dan eks Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. (wid, rls, ist, ant/dya)

Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tetapkan Eks Pejabat Pajak Tersangka Korupsi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Mohamad Haniv (HNV) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Haniv diduga telah menerima aliran dana dengan nilai total sekitar Rp 21,6 miliar selama ia menjabat sejak tahun 2015-2018.

Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus pada periode 2015 hingga 2018, Haniv diduga telah memanfaatkan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan pribadi serta bisnis fashion anaknya, Feby Paramita.

"Tersangka HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh serta koneksinya," ujar Asep dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Merah Putih, Selasa (25/2/2025).

Asep mengungkapkan bahwa Haniv mengajukan permohonan sponsorship untuk acara fashion show FH POUR HOMME by FEBBY HANIV melalui email kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3, Yul Dirga. Permintaan tersebut ditujukan kepada 2-3 perusahaan yang kenal dekat saja dengan jumlah yang tercantum dalam proposal sebesar Rp 150 juta.

Setelah adanya permohonan tersebut, terjadilah aliran dana dari beberapa wajib pajak di Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus ke rekening anak Haniv, Feby. Berdasarkan data yang diperoleh KPK, selama tahun 2016 hingga 2017, total dana yang diterima dari sponsorship untuk acara fashion show tersebut mencapai Rp 804 juta, di mana Rp 387 juta diantaranya berasal dari perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus.

Asep bilang perusahaan-

perusahaan tersebut tidak memperoleh keuntungan atau eksposur dari sponsorship yang mereka berikan. Hal ini mengindikasikan adanya unsur gratifikasi dalam transaksi tersebut. Atas perbuatannya, Haniv diduga melanggar Pasal 12 B U U P e m - berantasan Korupsi.

Selain itu, Haniv juga diduga menerima sejumlah uang dalam bentuk valuta asing dari berbagai pihak melalui seorang perantara bernama Budi Satria Atmadi. Dana tersebut kemudian ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan menggunakan nama pihak lain, dengan total nilai mencapai Rp



Mantan Kakanwil Pajak DKI Muhammad Haniv saat di Gedung KPK. Dok

10,35 miliar sebelum akhirnya dicairkan ke rekening pribadinya sebesar Rp 14,09 miliar.

Dari perhitungan KPK, total gratifikasi yang diterima Haniv mulai dari sponsorship, aliran dana valuta asing hingga deposito BPR berjumlah Rp 21,56 miliar. (din, ant, rls/dya)

PDIP Jelaskan Instruksi soal Retret dengan Penahanan Hasto

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menjelaskan latar belakang dikeluarkannya Instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menunda kegiatan retret kepala daerah dari partainya. PDIP juga menyinggung keterkaitan instruksi itu dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Mengenai latar belakang dikeluarkannya instruksi harian Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menunda, saya ulang, menunda, jadi tidak ada perintah melarang dan atau menarik kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti acara retret yang diselenggarakan oleh Kemendagri," ujar Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Hadir dalam konferensi pers ini Jubir PDIP lainnya, Ronny Talapessy didampingi elite PDIP Adian Napitupulu, Andreas Hugo, hingga Guntur Romli. Basarah kemudian menjawab pertanyaan mengapa instruksi ini seakan-akan dikeluarkan setelah penahanan Hasto oleh KPK tanggal 20 Februari lalu.

"Kalau ada pertanyaan mengapa seakan-akan mengapa instruksi tersebut baru dikeluarkan setelah penahanan Sekjen DPP PDI Perjuangan. Pertama dalam pandangan hukum dan pandangan politik DPP PDI Perjuangan, masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Doktor Hasto Kristiyanto adalah masalah yang menimpa PDIP, karena jabatan yang melekat dalam diri Doktor Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan," kata dia.

Basarah mengatakan penahanan Sekjen PDIP menjadi masalah serius partai. Kemudian, kata dia, di saat bersamaan Kemendagri telah mengagendakan retret kepala daerah di Magelang.

"Tentulah penahanan seorang Sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami, dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tapi juga sebuah peristiwa politik. Saat yang bersamaan memang Pemerintah RI melalui Kemendagri sudah mengagendakan kegiatan retret dimaksud, tetapi mohon maaf dengan sebesar-besarnya, bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan retret dimaksud DPP PDI Perjuangan selaku induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan lengkap dan detail mengenai kegiatan dimaksud," jelasnya.

Basarah kemudian menambahkan bahwa PDIP memiliki tiga pilar struktur partai. Pertama adalah pilar struktur partai, mulai dari pimpinan ranting sampai Ketua Umum PDI Perjuangan. Kedua adalah pilar partai di legislatif, yang terdiri dari anggota



Konferensi pers DPP PDIP menyikapi retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam. (Any)

DPKD kabupaten/kota, provinsi hingga DPR RI. Ketiga adalah pilar partai di eksekutif yaitu kepala, wakil kepala daerah, gubernur, menteri sampai presiden RI dari PDIP.

"Nah kepala daerah itu adalah pilar eksekutif partai, pada saat kegiatan retret itu dilaksanakan memang kami belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa dan bagaimana kegiatan retret bagi kepala daerah yang baru terpilih itu. Ini mungkin dapat dimaklumi karena memang dalam pemerintahan sebelumnya kita belum pernah mengikuti kepala daerah setelah dia terpilih untuk mengikuti program retret," jelas dia.

Basarah menambahkan bahwa Megawati telah melakukan pertemuan dengan para kepala daerah dari PDIP pada tanggal 18 Februari. Pertemuan ini dalam rangka pembekalan untuk kepala daerah.

"Sementara sebelum itu Ibu Megawati Soekarnoputri tepatnya tanggal 18 Februari, sebelum tanggal 21, hanya tiga hari sebelum itu, Ibu Megawati telah melakukan pertemuan dengan kepala daerah dalam rangka memberikan pembekalan bagaimana setelah beliau-beliau itu dilantik oleh Presiden RI dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban, tapi itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan, atau pertemuan tertutup yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," tutur dia.

"Dan di sisi lain, kepala-kepala daerah ini adalah elite-elite partai, sehingga ketika partai punya masalah seperti ini, maka bahasa yang kami gunakan kepada rekan-rekan kepala daerah itu kita memerlukan tempo untuk melakukan konsolidasi atas dinamika dan dialektika politik yang berkembang," imbuhnya.

Basarah mengatakan PDIP kemudian melakukan pengkajian mengenai retret tersebut. Akhirnya, diputuskan bahwa Pramono Anung sebagai koordinator kepala daerah dari PDIP yang mengikuti retret.

"Dan setelah melakukan pengkajian, dan menugaskan Doktor

Pramono Anung selaku Gubernur Daerah Jakarta yang ditugaskan sebagai koordinator kepala-kepala daerah ya Mas Pram turun langsung di Magelang, berkoordinasi langsung dengan kepala-kepala daerah yang ada di sana lalu kemudian diambilah penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada bagi kepala daerah kita masing-masing. Ada kepala daerah yang saat instruksi itu dilakukan sudah datang di Magelang, ada yang sedang di dalam perjalanan dan masih ada yang di daerahnya masing-masing. Mas Pramono Anung melakukan penyesuaian-penyesuaian situasi yang dialami oleh masing-masing kepala daerah tersebut," tutur dia.

Selain itu, PDIP juga menjelaskan terkait respons terhadap penahanan Hasto Kristiyanto. Dia menyebut PDIP memiliki AD/ART, di mana instansi tertinggi partai adalah Ketua Umum.

"Terhadap pertanyaan pasca penahanan Sekjen DPP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PDI Perjuangan menurut ketentuan AD/ART partai, Ketua Umum PDIP Perjuangan adalah instansi eksekutif tertinggi partai. Jadi Ketua Umum bukan sekedar jabatan, tapi dia instansi tertinggi karena ketua umumlah yang dipilih dan ditetapkan serta menjadi mandataris kongres PDIP. Instansi Ketua Umum inilah yang kemudian membentuk instansi di bawahnya dengan mandat kongres yang bernama DPP PDI Perjuangan," tutur dia.

Basarah mengatakan kongres memberikan hak prerogatif kepada ketua umum untuk mengambil langkah strategis partai. Utamanya, kata dia, dalam menyelamatkan eksistensi PDIP.

"Atas dasar kaedah hukum organisasi itulah maka Ibu Megawati Soekarnoputri menggunakan kewenangan prerogatifnya untuk menggunakan instruksi harian dan mengambil alih seluruh tanggung jawab kepartaian di tangan instansi Ketua Umum PDI Perjuangan. Maka atas dasar itu menjadi wajarlah jika fungsionaris DPP PDIP dalam melakukan koordinasi datang langsung ke kediaman beliau di

Teuku Umar," pungkasnya.

Kada Belum Retret Tetap di Daerahnya

Dia menyuarakan sikap partai terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan kepala daerah (Kada) lain dari partai itu yang ikut retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

Belum semua kepala daerah PDIP sudah masuk ikut retret, karena masih ada yang di luar termasuk Gubernur Bali Wayan Koster.

Basarah mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala daerah dari partainya yang belum masuk ke kawasan Akmil untuk tetap ke daerah masing-masing.

"Bagaimana dengan kepala daerah asal PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, di mana acara retret itu diselenggarakan? Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat," ujar Basarah.

Basarah mengatakan Megawati berpesan kepada kader-kader partainya yang terpilih untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing.

"Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri, meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau 'turba' dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke program pemerintah di daerahnya masing-masing," ujar Basarah.

Dia mengatakan DPP mempersilakan para kepala daerah tersebut untuk ikut retret angkatan ke-2 bersama para kepala daerah yang akan dilantik Presiden Prabowo usai putusan MK dalam sengketa pilkada serentak 2024.

Sementara itu, bagi Pramono dkk yang sudah di dalam Akmil diminta untuk lanjut mengikuti agenda retret kepala daerah tersebut.

"Bagi Kepala Daerah dari PDI Perjuangan yang telah mengikuti retret Angkatan-1 agar menyesuaikan rangkaian agenda retreat hingga selesai," ujar Basarah.

Pada kesempatan itu, Basarah menegaskan bahwa Megawati dalam instruksi harian yang dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025) lalu tak melarang kepala daerah dari partainya ikut retret kepala daerah, hanya meminta menunda keberangkatan. (wid,rls,ist,ant/dya)

Juni-Agustus Puncak Panen, Pemkab Malang Targetkan Produksi Ikan Laut 21.351 Ton di 2025

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menargetkan produksi ikan laut pada 2025 sebanyak 21.351,28 ton. Angka ini meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 20.729,40 ton.

Meski cuaca di awal tahun sering menjadi kendala bagi nelayan, siklus tahunan menunjukkan produksi akan meningkat mulai April hingga mencapai puncaknya pada Juni-Agustus.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, mengharapkan agar nelayan dapat memanfaatkan puncak musim panen ikan dengan maksimal. "Tangkap laut 2024 itu 20.729.40 ton. Target tangkap laut di 2025 ini 21.351.28 ton," ujar Victor, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Selasa (25/2/2025).

Victor menambahkan, berdasarkan data di Januari 2025, jumlah produksi ikan laut yang mendarat di pelabuhan Kabupaten Malang masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 10 ton. Yang didominasi oleh ikan lemuru. Namun pada puncak musim panen, menurutnya jumlah tangkapan ikan laut dapat meningkat drastis hingga 2.000-3.000 ton, per

bulan.

"Ikan lemuru itu harganya saat ini berkisar antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram," tambahnya.

Lebih lanjut, Victor menjelaskan kondisi hujan dan angin di awal tahun merupakan fenomena yang terjadi setiap tahun. Meski demikian, nelayan tetap dapat melaut pada hari-hari tertentu di bulan Januari, meskipun hasil tangkapan mereka cenderung kecil.

"Setiap tahun, di bulan Januari, Februari, dan Maret, tangkapan nelayan kecil sekali. Mulai meningkat kembali di bulan April hingga puncaknya pada Juni, Juli, dan Agustus," katanya.

Ditegaskannya, pola tangkapan ikan setiap tahun hampir selalu sama. Setelah puncak panen di pertengahan tahun, hasil tangkapan akan mulai menurun lagi pada September hingga Desember.

Namun, sambungnya, yang berbeda adalah puncak musim ikan, yang dapat terjadi antara Juni, Juli, atau Agustus tergantung kondisi di lapangan.

Meskipun hasil tangkapan masih minim di awal tahun, Victor memastikan harga ikan tetap stabil karena fenomena ini merupakan

siklus tahunan yang sudah dipahami oleh para nelayan dan pedagang ikan. "Yang perlu digarisbawahi adalah ini kejadian biasa, jadi tidak berpengaruh pada harga ikan," jelasnya.

Dalam kesempatannya, Victor mengaku Pemerintah Kabupaten Malang tidak menyiapkan upaya khusus untuk menghadapi periode tangkapan rendah ini. Namun, pihaknya tetap melakukan pemantauan di lapangan serta memberikan solusi agar proses pendaratan dan pelelangan ikan bisa berlangsung cepat.

"Langkah ini bertujuan agar ikan segera terdistribusi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI), cold storage, dan pedagangan," paparnya.

Victor juga mengimbau nelayan agar tetap berhati-hati saat melaut di awal tahun, terutama ketika cuaca kurang bersahabat. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas



Ilustrasi hasil tangkapan laut di Kabupaten Malang. (dok. ist)

utama sebelum mempertimbangkan hasil tangkapan.

"Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk kami, Pemkab kemudian pelaku usaha perikanan, juga diperlukan agar sektor perikanan di Kabupaten Malang terus berkembang. Dengan pola tangkapan yang sudah dipahami, diharapkan produktivitas nelayan tetap optimal sepanjang tahun," pungkasnya. (Santi/Dya)

Catat Sejarah Pemilu Lewat Buku 'Dinamika Pilkada Kota Malang Tahun 2024'



KPU Kota Malang resmi meluncurkan buku Dinamika Pilkada Kota Malang Tahun 2024, Selasa (25/2/2025). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Menutup rangkaian panjang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang merilis buku bertajuk "Dinamika Pilkada Kota Malang Tahun 2024." Buku ini merangkum seluruh proses penyelenggaraan Pilkada, mulai dari pembentukan badan ad-hoc, pemutakhiran data pemilih hingga penghitungan suara.

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyib, mengatakan

peluncuran buku ini merupakan upaya KPU dalam mendokumentasikan perjalanan Pilkada 2024. Diketahui, untuk pertama kalinya digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024 lalu, setelah Pemilu Presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024.

"Kami ingin buku ini menjadi bagian dari sejarah kepemiluan. Pilkada serentak 2024 memiliki banyak tantangan, dan kami ingin mendokumentasikan seluruh perjalanannya. Mulai dari pembentukan badan ad-hoc, pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara," ujar Toyib, dikonfirmasi usai peluncuran buku tersebut, Selasa (25/2/2025).

Untuk diketahui, saat ini Kota Malang telah memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang definitif hasil Pilkada 2024, yakni Wahyu Hidayat

dan Ali Muthohirin. Keduanya resmi menjabat setelah dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pasangan ini berhasil mengalahkan dua pesaingnya, yaitu Heri Cahyono-Ganis Rumpoko serta Mochamad Anton-Dimyati Ayatulloh, dalam kontestasi politik yang berlangsung ketat.

Lebih dari sekadar dokumentasi, Toyib menuturkan buku ini juga berisi evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024, termasuk dinamika eksternal seperti tantangan dan hambatan yang dihadapi KPU selama proses berlangsung.

Toyib berharap buku ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan menjadi referensi bagi akademisi dalam melakukan kajian tentang kepemiluan.

"Kami ingin apa yang kami lakukan dalam Pilkada 2024 bisa menjadi pembelajaran bagi KPU sendiri, bagi masyarakat, utamanya untuk akademisi bisa sebagai preferensi dalam pendidikan politik secara umum," tambahnya.

Rencananya, buku setebal hampir 200 halaman ini akan dicetak dalam jumlah banyak agar dapat menjangkau

lebih banyak pembaca.

Dari segi evaluasi, Toyib menegaskan KPU Kota Malang telah melakukan berbagai kajian mendalam, salah satunya melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan media dan pihak terkait. Evaluasi ini mencakup aspek bimbingan teknis (Bimtek), koordinasi antara KPU dan Bawaslu, serta berbagai faktor lain dalam penegakan demokrasi.

"Evaluasi ini sangat penting bagi kami karena berbasis pada fakta di lapangan. Hasilnya juga akan diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU RI sebagai bagian dari kesimpulan besar di tingkat nasional," katanya.

Selain itu, Toyib menekankan regulasi kepemiluan harus menjadi acuan bagi seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Ia menegaskan profesionalisme penyelenggara, transparansi kepada masyarakat, serta kepatuhan peserta terhadap aturan perundang-undangan adalah kunci suksesnya Pilkada.

"Jika semua pihak berpegang teguh pada regulasi yang ada, maka pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti," tutupnya. (Santi/Dya)

Jembatan di Korsel Ambruk, Kubur 10 Pekerja Hidup-hidup

SEOUL - Empat pekerja tewas dan enam lainnya terluka akibat jembatan ambruk di lokasi konstruksi jalan raya di Korea Selatan pada Selasa (25/2/2025), lapor kantor berita Yonhap.

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 9:49 pagi (waktu setempat) di lokasi konstruksi jalan Seoul-Sejong saat para pekerja sedang mengoperasikan derek untuk memindahkan balok baja di antara tiang penyangga. Jembatan kemudian ambruk dan mengubur 10 orang yang bekerja di lokasi itu.

Dua korban jiwa merupakan warga negara China, dan dua lainnya adalah warga Korea Selatan. "Dari mereka yang tewas, dua di antaranya adalah warga negara China dan dua lainnya warga Korea Selatan," kata seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri dikutip dari AFP.

Lima struktur beton berukuran 50 meter yang menopang jembatan jalan raya itu, menurut Yonhap, tiba-tiba runtuh satu demi satu setelah diangkat ke tempatnya dengan derek. Penyebab runtuhnya struktur beton itu belum diketahui secara jelas.

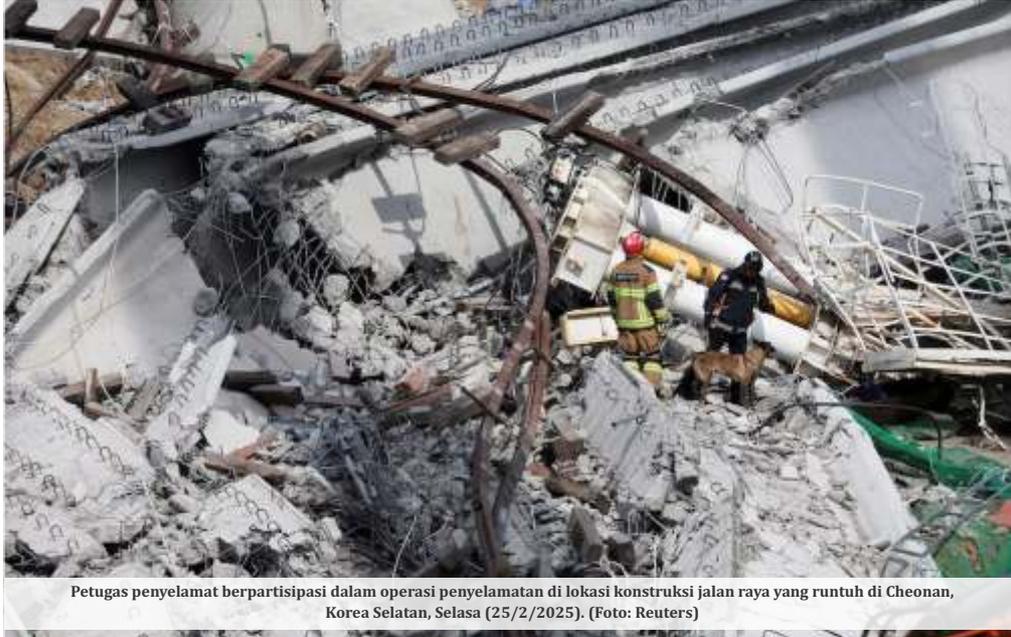
Dinas Pemadam Kebakaran Nasional Korsel menyebutkan bahwa lima orang mengalami luka serius, sedangkan seorang lainnya mengalami luka ringan.

"Mereka sedang memasang penopang di jembatan itu. Semuanya sepuluh orang itu berada di atas penopang tersebut... dan terjatuh dari kedua sisi ketika penopang itu runtuh," tutur Ko dalam konferensi pers yang disiarkan televisi setempat.

Laporan televisi lokal YTN menayangkan rekaman video dramatis yang memperlihatkan penopang jembatan itu, yang ada di ketinggian, runtuh di lokasi pembangunan.

Para petugas penyelamat di lokasi insiden terlihat memeriksa penyangga logam yang ringsek dan lempengan beton yang retak di bawah kolom jembatan jalan raya yang masih dalam proses pembangunan tersebut.

Sementara itu, perusahaan konstruksi Hyundai Engineering, yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut, menyampaikan permintaan maaf atas kecelakaan yang menimpa para pekerja.



Petugas penyelamat berpartisipasi dalam operasi penyelamatan di lokasi konstruksi jalan raya yang runtuh di Cheonan, Korea Selatan, Selasa (25/2/2025). (Foto: Reuters)

"Dengan tulus kami meminta maaf atas hilangnya nyawa dan adanya korban cedera yang secara tragis disebabkan oleh kecelakaan di lokasi konstruksi kami," kata pihak perusahaan tersebut seperti dikutip

Yonhap.

Jalan raya sepanjang 83 mil (atau sekitar 133,57 km) yang menghubungkan Seoul dan Sejong terpisah menjadi dua bagian.

Pembangunan jalan Anseong-Guri

di wilayah ibu kota telah rampung pada 1 Januari, sementara pembangunan jalan Sejong-Anseong dijadwalkan selesai pada akhir 2026.

Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengeluarkan arahan penting untuk memobilisasi semua sumber daya dan personel yang tersisa guna melakukan operasi penyelamatan.

Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korsel mengatakan pihaknya telah mengerahkan tiga helikopter dan hampir 150 petugas untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan. Kementerian Transportasi Korsel, secara terpisah, mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan tim pejabat ke lokasi kejadian.

Insiden ini menambah daftar panjang kecelakaan kerja di Korea Selatan, setelah pada 2020 hingga 2023 terdapat lebih dari 8.000 kematian. (Sputnik, AFP, Reuters, YTN, ist/nei)

Lindungi Eropa, Prancis Kerahkan Jet Tempur di Jerman

MOSKOW - Prancis kemungkinan akan mengerahkan jet-jet tempur bersenjata nuklir di Jerman jika Amerika Serikat (AS) menarik pasukannya dari Eropa, sebut pemberitaan The Telegraph.

Menurut The Telegraph, Prancis siap menggunakan kekuatan nuklirnya untuk melindungi Eropa. Namun, proposal resmi baru akan diajukan jika Presiden Donald Trump benar-benar menarik pasukan AS dari Jerman.

Seorang pejabat Prancis yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The Telegraph bahwa langkah ini akan "mengirim pesan kepada (Presiden Rusia) Vladimir Putin" serta menekan Inggris untuk mengambil tindakan serupa.

"Menempatkan beberapa jet tempur nuklir Prancis di Jerman seharusnya tidak sulit dan akan mengirimkan pesan yang kuat," ujarnya, dikutip pada Selasa (25/2/2025).

Dilaporkan bahwa kekuatan nuklir Prancis bersifat independen

dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sedangkan senjata nuklir Inggris merupakan bagian dari strategi pertahanan aliansi tersebut.

Friedrich Merz, kandidat kanselir Jerman dan pemimpin blok Persatuan Demokrat Kristen dan Persatuan Sosial Kristen (CDU/CSU) yang memenangkan Pemilu Bundestag pada Minggu, menyatakan bahwa Eropa tidak bisa lagi bergantung pada AS untuk pertahanan.

Dia menyerukan Prancis dan Inggris untuk memulai negosiasi terkait pertahanan nuklir.

Sementara itu, Senator Rusia Alexei Pushkov mengecam usulan Merz tersebut dengan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak masuk akal.

Presiden AS Donald Trump ber-



Gambaran jet tempur Prancis pada saat Prancis menggelar latihan tempur dengan Filipina pada Minggu, (23/2/2025) (Foto: AP)

ulang kali mengkritik negara-negara Eropa atas kontribusi pertahanan mereka yang rendah terhadap NATO dan menuntut agar seluruh anggota meningkatkan anggaran pertahanan hingga lima persen dari PDB.

Namun, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa Washington saat ini belum berencana mengurangi kehadirannya di Eropa. (Sputnik-OANA, The Telegraph, ist/nei)

Mudah Menangis Saat Marah,

Kenapa Bisa ?

SAAT marah, biasanya orang mungkin akan berteriak atau bersifat agresif untuk meluapkan amarahnya. Namun, ada juga orang yang justru menangis saat marah. Jika kamu salah satunya, tidak perlu khawatir. Mudah menangis saat marah itu normal dan bisa dijelaskan secara medis.

Menangis merupakan reaksi alami manusia untuk mengungkapkan suasana hatinya.

Mungkin banyak orang yang mengira bahwa menangis hanya dilakukan untuk menggambarkan perasaan sedih, terharu, atau bahagia saja. Padahal, saat sedang marah pun, seseorang bisa saja menitikkan air matanya.

Alasan Mudah Menangis Saat Marah

Pada dasarnya, manusia lebih mudah mengekspresikan rasa marah daripada menunjukkan dan mengakui perasaan sedih serta kecewa.

Rasa marah ini dapat diluapkan dengan banyak cara, bisa berupa perilaku agresif, mengeluarkan kritik, atau menunjukkan rasa cemas.

Namun, pada beberapa kondisi, saking intensnya emosi marah yang dirasakan, sebagian dari kita mungkin tidak memiliki tenaga lagi untuk meluapkan rasa marah tersebut, hingga akhirnya berujung dengan menitikkan air mata.

Di samping itu, perasaan marah dan sedih sering kali disebabkan oleh situasi yang sama, misalnya dipermalukan, dikhianati, diperlakukan tidak adil, penolakan, atau penghinaan. Jadi, munculnya dua

emosi dalam satu waktu setelah mendapatkan perlakuan tersebut sangat mungkin terjadi.

Menangis ketika marah merupakan cara untuk menenangkan diri. Menangis dapat mengubah fokus kita dari yang awalnya terpusat pada masalah menjadi mengatur dan mengontrol napas.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa saat seseorang menangis, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin dan prolaktin. Hormon ini dapat memperlambat detak jantung dan membuat tubuh lebih tenang serta relaks.

Menangis sebagai mekanisme tubuh saat marah

Menurut sebuah penelitian, ada tujuan yang ingin dicapai seseorang ketika mereka menangis. Tujuan tersebut dikaji dengan dua fungsi yaitu fungsi intrapersonal dan interpersonal.

Pada fungsi intrapersonal, menangis dianggap sebagai tindakan untuk menenangkan diri dari luapan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

Menumpuknya emosi negatif yang dikeluarkan melalui tangisan dipercaya dapat membuat seseorang merasa lebih baik. Dengan itulah menangis menjadi salah satu cara manusia dalam bertahan hidup.

Sedangkan pada fungsi interpersonal, menangis dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian atau bantuan dari seseorang.

Bahkan, ketika satu individu

melihat individu lainnya menangis, mereka secara refleks menangkap sebuah perilaku tersebut sebagai pertanda kesedihan atau kesulitan.

Walaupun banyak yang menganggap bahwa menangis adalah sebuah reaksi terhadap hal-hal menyedihkan, sebenarnya otak dan saluran air mata tetap tidak dapat membedakan emosi spesifik yang dirasakan.

Pada dasarnya, menangis adalah cara manusia melepas semua emosi yang intens saat mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikannya dengan cara lain, termasuk amarah.

Jika dikaji secara ilmiah, saat seseorang sedang marah, hormon stres akan meningkat.

Meningkatnya hormon stres ini juga diikuti dengan naiknya detak jantung dan tegangnya otot serta saraf dalam tubuh. Hal inilah yang akan membuat Anda kerap merasa sesak dan sulit bernafas ketika sedang marah.

Menangis akan membantu seseorang dalam mengendalikan amarah dan emosinya. Perilaku ini merupakan salah mekanisme tubuh untuk menenangkan diri.

Dengan menangis, tubuh akan memaksa seseorang untuk bernafas lebih dalam agar detak jantung lebih lambat dan rasa sesak di dada dapat berkurang. Hormon dan zat-zat lain yang dapat memicu stres dikeluarkan lewat air mata.

Cara Mengendalikan Rasa Marah dan Menangis

Marah dan menangis bukanlah

sesuatu yang salah ataupun sebuah tanda kelemahan. Sebaliknya, kedua hal tersebut merupakan bentuk ekspresi emosional yang wajar dan menunjukkan bahwa seseorang memiliki perasaan serta kemampuan untuk meluapkan emosi yang sedang dirasakan dengan cara yang sehat.

Menahan atau menekan emosi justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa mengungkapkan perasaan melalui kemarahan atau tangisan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari.

Namun, jika kamu merasa kesulitan dalam mengontrol amarah atau sering menangis secara berlebihan hingga kondisi tersebut mulai mengganggu aktivitas sehari-harimu, maka sebaiknya segera mencari bantuan profesional dengan berkonsultasi kepada dokter atau psikolog.

Hal ini penting dilakukan karena dikhawatirkan kondisi yang kamu alami bukan sekadar perubahan suasana hati biasa, melainkan merupakan gejala dari gangguan mental tertentu, seperti depresi, yang memerlukan perhatian serta penanganan lebih lanjut.

Dengan mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat, kamu bisa memahami kondisi emosionalmu dengan lebih baik serta menemukan cara yang efektif untuk mengelola perasaan agar tidak menghambat keseharian dan kualitas hidupmu. (nei/ist,dya)



Wamen Nezar: Pentingnya Antisipasi dalam Hadapi Tantangan AI

WAKIL Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria mengungkapkan tentang tantangan yang perlu diantisipasi, khususnya etika dalam teknologi kecerdasan buatan (AI).

Setidaknya, ia menjelaskan, ada sebanyak tujuh tantangan etika dalam teknologi AI yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah bias dan diskriminasi.

"Karena AI menggunakan data, dan pengolahan data ini dilakukan atau disiapkan oleh sebuah foundation model, yang berisi algoritma tertentu dan penyusunan algoritma ini terkadang juga tidak luput dari bias para developer-nya," ujar Nezar dalam sambutannya di acara Tech & Telco Summit 2025 di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menurut Nezar, bias ini disebabkan oleh manusia, di mana dalam konteks ini merupakan developer (pengembang) dari AI tersebut. Ia menilai, manusia memiliki kepercayaan tertentu dalam hal tertentu juga.

Kemudian data-data dari AI pun diambil dari sumber-sumber yang sudah ada bias-bias tertentu. Bias ini pun beragam, meliputi ras, suku, agama sehingga hasil data AI juga cukup mendorong pada kelompok masyarakat tertentu.

Lalu yang kedua yakni transparansi dan akuntabilitas. Menurut Nezar, banyak dari sistem AI beroperasi seperti black box (kotak hitam), di mana proses internalnya sulit dipahami.

"Karena AI menggunakan data, dan pengolahan data ini dilakukan atau disiapkan oleh sebuah foundation model, yang berisi algoritma tertentu dan penyusunan algoritma ini terkadang juga tidak luput dari bias para developer-nya,"

Nezar Patria
Wamenkomdigi

Sumber: Birio Humas
Kementerian Kominfo

"Jadi kadang-kadang sulit ditebak dengan model yang ada, dan sudah banyak riset juga bagaimana memecahkan persoalan black box dalam prosesing data yang dilakukan oleh artificial intelligence ini," ucap Nezar.

Hal ini berdampak pada sulitnya menilai serta mengetahui, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh teknologi AI.

Selanjutnya yang ketiga adalah perihal privasi, keamanan dan pengawasan. Nezar mengatakan, AI membutuhkan data dalam jumlah yang besar, untuk menghasilkan keputusan yang efektif.

Namun hal ini membuat data yang dibutuhkan meliputi data-data sensitif seperti data pribadi.

"Hal ini menimbulkan kecemasan dan juga kekhawatiran terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data yang dapat melanggar privasi individu," tuturnya.

Selanjutnya yang keempat adalah dampak penggantian tenaga kerja dengan teknologi AI. Menurutnya, isu ini menjadi besar dan ramai dibicarakan hingga tingkat global.

Kemajuan teknologi AI memang membuka peluang pekerjaan yang baru untuk manusia. Namun, terdapat juga risiko-risiko yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi AI.

Salah satunya yakni kehilangan pekerjaan pada sejumlah sektor industri tertentu, yang diakibatkan penggantian tenaga kerja dengan teknologi AI.

"Karena itu dalam membuat policy dan membuat kebijakan di masa transisi atau di masa transformasi digital ini, dibutuhkan data-data yang cukup valid. Lalu strategi yang tepat juga agar kita bisa memastikan pekerjaan yang terdampak, dapat beradaptasi dengan perubahan," imbuh Nezar.

Yang kelima adalah antisipasi dalam kreativitas dan kepemilikan karya seni oleh AI. Baginya, kreativitas dan kepemilikan karya seni dari AI tidak jelas status kepemilikannya.

Hal ini pun membuat banyak pihak menjadi komplain, serta fokus membahas mengenai hak cipta sebuah karya seni.

Lalu yang keenam adalah algoritma AI yang dimanfaatkan untuk manipulasi sosial. Isu algoritma AI menjadi isu yang diperhatikan karena rekayasa sosial lewat media sosial, bisa dilakukan dengan teknologi AI.

Terakhir adalah pengembangan senjata otonom berbasis teknologi AI, yang level autonomusnya bisa tanpa kendali manusia.

"Senjata itu bisa terbang sendiri dengan sejumlah data-data yang ada di dalamnya ya. Dan dia bisa melakukan reasoning sendiri lalu mengambil keputusan sendiri," ungkap Nezar.

Bagi Nezar, teknologi ini mirip dengan teknologi AI agentik yang sedang berkembang. Atau bahkan senjata otonom akan menjadi tren setelah generatif AI. (nei,ist/dya)



HARIAN **LENTERA**
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Rahasia Merawat Rambut Ikal agar Tetap Lembut dan Berkilau

RAMBUT ikal memiliki keunikan tersendiri, namun merawatnya bisa jadi tantangan. Tekstur ikal atau bergelombang membuat rambut lebih rentan kering, kusut, dan rusak dibandingkan dengan rambut lurus.

Faktor-faktor seperti kelebihan minyak, penggunaan produk yang tidak sesuai, dan kebiasaan styling yang tidak tepat bisa memperburuk kondisi rambut ikal.

Untuk itu, penting bagi pemilik rambut ikal untuk mengetahui cara yang tepat dalam merawatnya agar tetap sehat, terawat, dan berbentuk indah.

Perawatan rambut ikal yang tidak tepat bisa menyebabkan kekusutan, rambut kering, dan bahkan kerontokan.

Dilansir dari aad.org, pada artikel ini akan dibahas enam tips perawatan rambut ikal yang direkomendasikan oleh dermatologis, para ahli di bidang kesehatan kulit dan rambut.

Dengan mengikuti saran-saran ini, Anda dapat menjaga kelembapan alami rambut ikal, memperbaiki tekstur, serta mencegah masalah rambut yang sering terjadi pada jenis rambut ini.

Penasaran bagaimana caranya?



1. Mencuci Rambut Hanya Saat Diperlukan

Mencuci rambut ikal terlalu sering dapat membuatnya kering, kusut, dan sulit diatur. Rambut ikal yang tebal tidak perlu dicuci setiap hari atau bahkan setiap minggu. Namun, Anda harus mencuci rambut setidaknya setiap 2 hingga 3 minggu untuk menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut.

Jika rambut panjang atau tebal, cuci dalam bagian-bagian kecil untuk mengurangi kerusakan atau kusut. Pilih sampo pelembap yang diformulasikan khusus untuk rambut ikal. Jika biasanya menata rambut dengan gel, minyak, krim, atau pomade, pertimbangkan untuk menggunakan sampo clarifying sebelum sampo pelembap. Untuk menjaga rambut tetap segar pada saat mencuci rambut, gunakan penutup kepala saat mandi.

2. Jaga Kelembapan Rambut

Rambut ikal lebih kering dibandingkan dengan jenis rambut lainnya.

Untuk menjaga kelembapannya, gunakan kondisioner pada seluruh bagian rambut, bukan hanya pada

ujungnya. Oleskan kondisioner tebal setelah keramas. Kemudian, aplikasikan minyak atau kondisioner tanpa bilas setelah selesai keramas dan kondisikan rambut untuk membantu kelembapan.

Jika rambut sangat kering atau jika kesulitan mengurai rambut sebelum keramas, Anda juga dapat mengoleskan kondisioner sebelum keramas. Cari produk kondisioner yang mengandung bahan-bahan seperti minyak argan, gliserin, atau alkohol lemak seperti cetyl atau stearyl alcohol.

3. Rawat Kulit Kepala

Jika terlalu lama tidak keramas, kulit kepala mungkin menghasilkan minyak berlebih yang menyebabkan ketombe. Namun, sampo untuk ketombe dapat membuat rambut kering.

Oleskan sampo anti-ketombe hanya pada kulit kepala, kemudian biarkan selama 2-10 menit atau sesuai waktu yang tertera pada kemasan sebelum dibilas. Setelah itu, gunakan sampo pelembap pada sisa rambut. Jika mengalami ketombe, seorang dermatolog berlisensi dapat meresepkan obat untuk dioleskan pada kulit kepala.

4. Mengurai Rambut

Rambut ikal mudah kusut. Untuk mengurai rambut di antara waktu keramas, basahi rambut dengan baik dan aplikasikan kondisioner tanpa bilas, kemudian urai rambut dengan jari atau sisir bergigi lebar dan/atau sikat yang dirancang untuk rambut ikal atau keriting. Kerjakan dalam bagian-bagian kecil agar proses penguraian lebih mudah. Hindari menyikat rambut saat masih kering untuk mencegah rambut patah dan kusut. Pastikan untuk mengurai rambut saat keramas juga.

5. Lindungi Rambut dari Sinar Matahari

Panas dan sinar ultraviolet berbahaya dari matahari dapat membuat rambut ikal menjadi kering. Untuk melindungi rambut ikal, tutupi rambut dengan topi bertepi lebar dan pastikan rambut tetap terhidrasi.

6. Rawat Rambut Saat Tidur

Jika memungkinkan, Anda dapat mengikat rambut dengan ikatan ekor kuda longgar di atas kepala (seperti buah nanas) atau membuat kepong

longgar sebelum tidur untuk menjaga rambut dan mengurangi gesekan dengan sarung bantal, yang bisa membuat rambut menjadi kusut dan lebih mudah patah. Merawat rambut ikal memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kesehatannya dan mencegah kerusakan. Dengan mengikuti beberapa tips penting seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Anda dapat membantu rambut ikal agar tetap sehat, teratur,

Rambut Keriting Mudah Kusut

Rambut menjadi kering jika kulit kepala tidak memproduksi cukup sebum. Sebum merupakan minyak alami yang diproduksi oleh kulit kepala. Fungsinya untuk menjaga rambut tetap lembap dan lembut, sehingga tidak mudah kusut. Kondisi kusut disebabkan oleh gesekan antara helaian rambut yang kurang terlumasi minyak.

Rambut yang tebal, bergelombang, atau keriting cenderung lebih kering sehingga lebih mudah kusut. Semakin keriting struktur rambut, semakin besar pula potensi keringnya. Hal ini karena sebum lebih sulit menempel pada batang rambut yang keriting.

Bahan Alami untuk Merawat Rambut Keriting

Berikut ini adalah beberapa bahan alami yang bisa 'menjinakkan' rambut keriting dan kusut:

Minyak argan

Selain untuk menjaga kesehatan kulit, minyak argan juga dapat memelihara keindahan rambut. Oleskan minyak argan dari batang sampai ujung rambut. n mudah diatur.

Minyak zaitun

Lakukan hal yang sama seperti perawatan rambut dengan minyak argan. Akan tetapi, bungkus rambut yang sudah diberi minyak zaitun selama beberapa menit atau semalaman. Setelahnya, cuci rambut menggunakan sampo dan conditioner.

Alpukat

Cara merawat rambut keriting dan melembapkan rambut juga bisa dilakukan menggunakan masker alpukat. Caranya, campur alpukat, putih telur, dan madu, aduk hingga rata dan oleskan di rambut. (nei,ist/dya)



Pilkada (Belum) Usai ... (dari Hal 1)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2028 sampai dengan 2023.

Kejagung menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT. Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pada 2018-2023. Salah satu rumah yang digeledah kediaman dari pengusaha minyak Riza Chalid.

"Penyidik sekarang sedang melakukan pengeledahan," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (25/2/2025).

Pengeledahan ini, kata dia, dilakukan di Plaza Asia lantai 20 yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kemudian ada juga pengeledahan di Kebayoran Baru.

"Itu informasi yang bisa kami sampaikan, itu rumah siapa sudah disampaikan oleh Pak Dir Penyidikan, kita berharap dengan upaya tindakan pengeledahan ini akan semakin membuat terang membuka tabir tindak pidana ini," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirdik Jampidsus Abdul Qohar, membocorkan salah satu lokasi yang digeledah itu adalah kediaman dari Riza Chalid.

"Pengeledahan nanti terakhir akan disampaikan Pak Kapuspen ya, yang pasti satu aja bocoran kita geledah di rumahnya Mohammad riza, Riza Chalid," kata dia.

Diduga pengeledahan kediaman Riza Chalid ini terkait dengan status tersangka anaknya, Muhammad Kerry Andrianto Riza, di kasus tersebut.

Kemudian, kemarin, Kejagung juga menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Ada tujuh tersangka dalam kasus ini, Harli menyebut kediaman tujuh orang itulah yang digeledah.

"Tadi malam di tujuh tempat berbeda, yaitu rumah masing-masing dari para tersangka," kata Harli.

"Jadi, ada yang di Taman Bintaro, ada yang di Ruangan Kantor di Kecamatan Gambir, ada yang di Rumah di Kecamatan Pondok Aren, ada yang di Daerah Cimanggis, ada yang di rumah Dinas di Cilandak, ada rumah di Kebayoran Lama, ada rumah di Kelurahan Cipete Selatan," ucapnya.

Dari pengeledahan semalam, Kejagung mengamankan sejumlah barang bukti elektronik seperti handphone hingga laptop. Selain itu ada dokumen dan juga uang dari berbagai mata uang senilai Rp 400 juta.

Sebanyak tujuh orang tersangka yang dijerat Kejagung dalam perkara ini. Empat di antaranya merupakan petinggi di subholding Pertamina, berinisial RS, SDS dan YF dan AP.

Sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah MKAR (Muhammad Kerry Andrianto Riza) selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim; GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak.

Perkara ini terjadi pada 2018-2023. Pemerintah menancangkan agar pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari dalam negeri. Pertamina, diwajibkan mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Hal itu telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Namun ternyata, diduga ada pengkondisian untuk menurunkan produksi kilang sehingga hasil produksi minyak bumi dalam negeri tidak sepenuhnya terserap.

"Pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor," ungkap Dirdik Kejagung Abdul Qohar, Senin (24/2/2025).

Pada saat yang sama, produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS juga dengan sengaja ditolak.

Alasannya, produksi minyak mentah oleh KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harganya masih sesuai harga perkiraan sendiri (HPS).

Tak hanya itu, produksi minyak mentah dari KKKS juga dinilai tidak sesuai spesifikasi. Namun faktanya, minyak yang diproduksi masih dapat diolah sesuai dengan spesifikasi.

"Pada saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor," jelas Qohar.

Dua anak perusahaan Pertamina kemudian melakukan impor minyak mentah dan produk kilang. Di mana, perbedaan harga pembelian minyak bumi impor sangat signifikan dibandingkan dari dalam negeri.

Dalam kegiatan ekspor minyak juga diduga telah terjadi kongkalikong pengaturan harga dan menyebabkan kerugian negara.

"Seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan," ucap Qohar.

Salah satu contoh pembelian tersebut, yakni seakan-akan membeli minyak RON 92 tetapi sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 yang kemudian diolah kembali.

Selain itu, ada juga dugaan mark up kontrak dalam pengiriman minyak impor. Sehingga, negara perlu membayar biaya fee tersebut sebesar

13-15 persen.

Atas perbuatan para tersangka ini, menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN.

"Mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp 193,7 triliun," kata Qohar.

Sakit Hati Warganet

Kasus korupsi Pertamina Patra Niaga yang rugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah rupanya sukses bikin publik kecewa berat.

Akibatnya, kata 'Pertamina' dan 'Pertamax' pun sampai trending di media sosial X, berisi wujud kekecewaan publik yang tertuang melalui cuitan-cuitan.

"Orang pake Pertamax dengan kesadaran merawat kendaraan dan bukan bagian dari penerima subsidi mengalami kenyataan bensin yang dijual under spec," cuit Netizen melalui akun @*hrdbac*t.

Cuitan akun tersebut ramai disamber publik dengan beragam keluh kesah, dan juga ungkapan kecewa.

"Pertanyaannya: Apakah ini ada kaitannya dengan masalah Pertamax kemarin? Apakah ini ada kaitannya dengan kelangkaan BBM swasta kemarin? Apakah ini penyebab harga BBM tidak ada penurunan walaupun harga minyak dunia turun?" celemek warganet lain.

"Terima kasih Presiden @Prabowo setelah sekian lama misteri rusaknya beberapa mesin mobil yang mengisi Pertamax akhirnya terungkap juga penyebabnya," timpal netizen.

Selain itu ada juga warganet yang menganggap bahwa beli Pertamax cuma setara dengan beli BBM jelek tapi minus antrean.

"Rasanya marah banget baca berita ini. Saya udah nyoba jadi warga negara yang baik dengan beli Pertamax agar BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, and this is what I got? Jadi selama ini kita bayar lebih mahal cuma buat nge-cut antrean?" tulis salah seorang pengguna X.

"Selama ini ternyata gue bukan beli Pertamax tapi beli fast-track doang," kata salah seorang warganet dengan nada kecewa.

Pertamina Membantah

PT Pertamina (Persero) membantah tuduhan adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Peralite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

"Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kejaksaan," ujar Vice President

Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Menurut Fadjar, terdapat narasi yang keliru ketika memahami pemaparan oleh Kejaksaan Agung.

Fadjar menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Peralite menjadi Pertamax.

RON 90 adalah jenis bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki nilai oktan sebesar 90. Pada produk Pertamina, RON 90 adalah Peralite, di sisi lain RON 92 adalah Pertamax.

Dalam kesempatan tersebut, Fadjar menegaskan bahwa produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Adapun lembaga yang bertugas memeriksa ketepatan spesifikasi dari produk yang beredar di masyarakat adalah Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing," ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga angkat suara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan pihaknya akan menghormati segala proses hukum yang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

"Kita menghormati proses hukum," ungkap Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pihaknya sendiri sudah memaksimalkan produksi minyak dalam negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

"Kita coba maksimumkan untuk semua produksi (minyak) dalam negeri, dan arahan dari Pak Menteri semaksimal mungkin diolah dalam negeri, untuk diolah di kilang dalam negeri," tegasnya.

Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Viola mengatakan, Kementerian BUMN telah mulai berkordinasi dengan Pertamina pasca penetapan tersangka kasus korupsi tersebut.

"Kementerian BUMN sejauh ini terus berkomunikasi dengan Pertamina, maaf kita belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai hal ini, kita masih berkomunikasi," kata Putri di Gedung Kementerian BUMN, Selasa (25/2/2025).

Putri memastikan, sejauh ini belum ada kordinasi dengan Kejagung. Komunikasi baru dilakukan antara Kementerian BUMN dan Pertamina saja. (qid, rls, ant, kum, ist/dya)

Buntut PSU Pilkada di 24 Daerah KPU Dituding Kurang Profesional

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai kurang profesional buntut putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pilkada Serentak 2024. Diketahui, sebanyak 24 daerah harus menjalani pemungutan suara ulang (PSU) karena berbagai masalah pelanggaran hukum dan administrasi.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah putusan agar Pilkada Serang diulang karena MK menilai ada keterlibatan Mendes Yandri Susanto dalam kapasitasnya selaku pejabat negara dalam kontestasi yang diikuti istrinya.

Adapula calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra yang didiskualifikasi karena ternyata tak lulus SMA.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, putusan MK ini menjadi bukti penyelenggara pemilu tidak bekerja dengan profesional di beberapa daerah.

"Putusan MK terkait dengan perselisihan hasil Pilkada hari ini, memang mengindikasikan beberapa KPU di tingkat kabupaten kota itu bekerja dengan kurang profesional bahkan lalai baik secara administrasi maupun secara hukum," kata Rifqinizamy dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

Bagi Rifqi ini menjadi catatan penting bagi Komisi II untuk mengkritisi mekanisme pemilihan penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu.

"Termasuk ke depan bagaimana mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia," katanya.

Meski terdapat pelanggaran, Rifqi tidak memungkiri bahwa di daerah lain penyelenggara pemilu sudah bekerja secara maksimal dan profesional.

"Kendati demikian, kami melihat secara umum dari 545 KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, secara umum tentu yang lain masih melakukan dengan taat pada peraturan perundang-undangan dan prosedur," tuturnya.

KPU menegaskan sudah profesional dalam menggelar Pilkada 2024. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik menanggapi sejumlah putusan MK.

"Kemarin pun sebenarnya KPU sudah melakukan secara profesional," aku Idham.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi perintah PSU itu lantaran MK menilai terjadi pelanggaran saat proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU daerah. Pada sengketa hasil Pilkada



Petugas Penanganan Prasarana & Sarana Umum (PPSU) diperbantukan untuk mendistribusikan kotak suara yang telah terisi kelengkapan untuk pencoblosan di gudang logistik Pilkada di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. (Dok.ist)

Pesawaran 2024, misalnya, MK memerintahkan KPU menggelar PSU dengan mendiskualifikasi calon nomor 1 Aries Sandi karena ternyata belum menyelesaikan pendidikan SMA.

Idham menegaskan, dalam menyelenggarakan Pilkada 2024, khususnya saat proses penerimaan pendaftaran calon, pihaknya hanya menjalankan fungsi administratif. Yakni, mengecek keabsahan dokumen yang diserahkan.

"Misalnya ketika KPU menerima surat keterangan dari pengadilan, lalu diklarifikasi bahwa itu benar, ya sudah. Tapi dalam perkembangannya kan ada kasus di mana surat pengadilan tersebut dicabut oleh lembaga penderbitnya," ujar dia.

Lebih lanjut, Idham memastikan putusan MK terhadap hasil Pilkada 2024 bakal menjadi catatan pihaknya. Terlebih, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Anggaran Dibantu APBN

KPU mengaku berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengenai anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah pemilihan.

Anggota KPU, August Mellaz mengatakan saat ini KPU tengah melakukan pengkajian sejumlah putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024, yang putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk 24 perkara yang harus melaksanakan PSU dari 26 perkara yang dikabulkan.

"KPU sedang mengkaji, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya," ujar Mellaz.

Dia memastikan, setelah pengkajian selesai dilakukan KPU RI, maka akan dilanjutkan koordinasi dengan KPU daerah yang harus melaksanakan putusan MK termasuk PSU.

Baru kemudian pasca langkah itu, ditegaskan mantan Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) itu, KPU RI bakal membahas kesiapan pelaksanaan PSU dengan Kemendagri.

"Setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan tersebut selesai, maka koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan Kemendagri," demikian Mellaz menambahkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, ia menyebut ada kemungkinan perbantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jika diperlukan.

Anggaran untuk PSU di 24 daerah hasil putusan MK menjadi perhatian. Terutama dengan adanya instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.

"Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimanapun 24 putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing. Kami tentu akan melakukan exercise dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri. Dan jika memang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, APBN bisa melakukan perbantuan," ujar Rifqi melalui keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Dia menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak terganggu oleh kendala pendanaan. Dirinya juga mengingatkan bahwa putusan MK harus segera dilaksanakan demi menjaga integritas pemilu dan menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang definitif.

"Prinsip dasarnya putusan MK harus segera kita laksanakan, karena jika tidak, bukan hanya kita tidak

Daftar daerah yang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh MK:

- **Tenggat Waktu 30 Hari (26 Maret 2025)**
PSU sebagian wilayah:
 Kabupaten Barito Utara
 Kabupaten Magetan
 Kabupaten Bangka Barat
 Kabupaten Siak
- **Tenggat Waktu 45 Hari (10 April 2025)**
PSU semua wilayah:
 Kabupaten Bengkulu Selatan
 PSU sebagian wilayah:
 Kabupaten Buru
 Kota Sabang
 Kabupaten Kepulauan Talaud
 Kabupaten Banggai
 Kabupaten Bungo
 Kabupaten Pulau Taliabu
- **Tenggat Waktu 60 Hari (25 April 2025)**
PSU semua wilayah:
 Kota Banjarbaru
 Kabupaten Pasaman
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Empat Lawang
 Kabupaten Serang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kabupaten Gorontalo Utara
 Kabupaten Parigi Moutong
- **Tenggat Waktu 90 Hari (25 Mei 2025)**
PSU semua wilayah:
 Kabupaten Mahakam Ulu
 Kabupaten Pesawaran
 Kota Palopo
- **Tenggat Waktu 180 Hari (23 Agustus 2025)**
PSU semua wilayah:
 Kabupaten Boven Digoel
 Provinsi Papua
- **Sementara satu daerah harus dilakukan rekapitulasi suara ulang yakni:**
 1. Kabupaten Puncak Jaya dengan tenggat 26 Maret 2025.

menghargai konstitusi, tetapi pada sisi yang lain, kita tidak mendapatkan kepala daerah yang definitif hasil pemilu kita," kata politikus Partai NasDem itu.

Lebih lanjut, Rifqi mengatakan KPU bersama Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses PSU agar berjalan transparan, efisien, dan bebas dari potensi gugatan hukum lebih lanjut. Harapannya, pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum bagi hasil pemilu di 24 daerah yang terdampak putusan MK.

Rifqi juga mengingatkan soal keterlibatan masyarakat dalam PSU menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Sosialisasi mengenai pelaksanaan PSU harus dilakukan secara masif agar pemilih mengetahui hak dan kewajibannya dalam menggunakan suara mereka kembali.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan daerah-daerah tersebut punya anggaran yang cukup untuk melaksanakan PSU. (din, ist, rls, wid/dya)